

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Aloysius Uwiyono (dkk.), 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Badriyah Khaled, 2016, *Mekanisme Pengadlan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

H. Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.

H. Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

H. Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.UMITOA.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, *“Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Koesparnomo Irsan, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.

Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Lukman Santoso Az, 2016, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Ponorogo.

Malayu SP Hasibuan, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Mohammad Mahrus Ali, 2019, *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, Salemba Empat, Jakarta.

Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta.

Pan Mohamad Faiz (ed), Anna Triningsih (ed), dan Achmad Edi Subiyanti (ed), 2019, *Mahkota Mahkamah Konstitusi “Bunga Rampai 16 Tahun Mahkamah Konstitusi”*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, Cetakan Kesebelas*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon (dkk.), 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 126-30.
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung,
- Ridwan HR., 2018, "*Hukum Administrasi Negara*", *Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ruslan Abdul Ghofur, 2020, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pratama, Jakarta.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sugiyarso dan F. Winarni, 2005, *Managemen Keuangan*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Syamsul Bachri, 2015, *Politik Hukum Perburuhan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi :

Budiyono, 2007, Penetapan upah minimum dengan kaitannya dengan upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan perkembangan perusahaan, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1-105.

Eka Fitri Karmila, 2020, Perlindungan hukum terhadap pengupahan ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT. Riau Perkasa Steel jalan Raya Pasir Putih No.16 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 1-76.

Eka Merdekawati, 2009, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan pegujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Latifah Hanim Putri Sari, 2019, Mekanisme penetapan upah minimum di provinsi Lampung dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menurut perspektif hukum ekonomi syariah, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm. 1-132.

Siti Maria, 2013, Studi fungsi upah wanita pekerja sektor manufaktur dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1-193.

Wiranti, 2021, Tinjauan yuridis perubahan ketentuan upah pekerja pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1-93.

Artikel Jurnal :

- A Sakti R. S. Rakia, 2021, "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19", SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Maret, hlm. 158-172.
- Andri Setiawan, Antikowati, Bayu Dwi Anggono, 2021, Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18 No. 1 – Maret, hlm. 18-30.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2021, Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Pranata Hukum, Vol.3 No. 1 Februari, hlm. 76-89.
- Andryan, 2018, Implikasi Putusan Hak Uji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 3, September, hlm. 367-380.
- Herman, 2017, Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beshikking*), Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 3, Nomor 1 Februari, hlm. 82-95
- Novendri M.Nggilu, 2019, "Menggagas sanksi atas tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret, hlm. 43-60
- Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Vol 01 Nomor 01 Tahun Juli, hlm. 13-22.
- Mahripin, 2015, "Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Tengah", e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 7, Juli, hlm. 175-185.
- M. Agus Maulidi, 2019, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni, hlm. 339-362.

Andi Yuliani, 2017, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 04 – Desember, hlm. 429-438.

Muchammad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni, hlm. 234-261.

Oki Wahyu Budijanto, 2017, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum dan HAM”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, September, hlm. 395-412.

Tubagus Muhammad Nasarudin, “Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan”, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016, hlm. 139-154.

Zaitun Rohma dan Prani Sastiono, 2021, “Pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah khususnya di provinsi Pulau Jawa”, Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, Vol. 21 No. 2, Juli, hlm. 235-256.

Sumber Website:

<https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-bahas-proses-penetapan-upah-minimum-tahun-2022>, diakses pada Selasa, 1 Maret 2022.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20220101/12/1484275/menaker-surati-para-gubernur-soal-ump-2022-ini-isinya> diakses pada Selasa, 19 April 2022.

<https://kbbi.web.id/rekomendasi>, diakses pada Senin, 23 Mei 2022.

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-sulsel-putusan-ump-tahun-2022-sebesar-rp-3-165-876>, diakses pada Senin, 23 Mei 2022.

<https://dialeksis.com/aceh/inilah-rekomendasi-nilai-upah-minimum-provinsi-aceh-tahun-2022-kepada-gubernur/>, diakses pada Senin, 23 Mei 2022.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/11/24/gubernur-tetapkan-ump-aceh-tahun-2022-segini-besarannya>, diakses pada Senin, 23 Mei 2022.

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4715725/daftar-daerah-tetapkan-kenaikan-ump-2022-siapa-naik-paling-tinggi>, diakses pada Senin, 23 Mei 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diundangkan di Jakarta pada

tanggal 4 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.